

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DOKUMEN

MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



**SEKRETARIAT UTAMA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

DOKUMEN MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA BSSN

Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Biro Umum

A. UMUM

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan merupakan dokumentasi atas seluruh tahapan dalam pengelolaan risiko, baik untuk risiko strategis, risiko operasional maupun risiko proses. Dokumen Mitigasi Risiko bersifat dinamis, dalam artian akan terus berubah sesuai dengan tahapan serta penanganan yang dilakukan. Perubahan tersebut akan terjadi seiring dengan adanya risiko-risiko baru yang di awal belum teridentifikasi atau belum muncul.

Pengelolaan risiko di BSSN termasuk didalamnya pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa BSSN mengacu pada Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Siber Dan Sandi Negara. Sedangkan panduan dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BSSN sebagaimana diatur pada Pedoman Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Siber Dan Sandi Negara.

Dalam tahap pelaksanaan penyelenggaraan SPIP perlu ditetapkan kebijakan terkait implementasi unsur penilaian Risiko. Kebijakan tersebut meliputi Klasifikasi Risiko, Skala Kriteria Risiko, Selera Risiko dan Jenis Respon Risiko.

1. Klasifikasi Risiko

Risiko di BSSN diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Risiko Strategis
- b. Risiko Operasional
- c. Risiko Kecurangan
- d. Risiko Kepatuhan

2. Skala Kriteria Risiko

Skala kriteria Penilaian Risiko sebagai acuan dalam melakukan analisis dan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

a. Skala Dampak

Skala dampak yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu Risiko

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

| Nilai | INTERNAL | | | | | | |
|-------|---------------|---|--|--|--|---|---|
| | SKALA | KERUGIAN NEGARA | PERATURAN atau HUKUM | KEAMANAN ASET DAN INFORMASI | REPUTASI | OPERASIONAL | KINERJA |
| 1 | Tidak Berarti | Jumlah kerugian negara ≤ Rp 10 Juta | Tidak ada pelanggaran hukum | Tidak ada kebocoran atau kehilangan aset informasi | Keluhan pemangku kepentingan secara langsung lisan atau tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 kali dalam satu tahun anggaran | Proses Bisnis tertunda ≤ 1 hari | Pencapaian target kinerja ≥ 100% |
| 2 | Kecil | Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 10 juta s.d Rp 50 juta | Pelanggaran ringan dengan teguran | Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada lingkup unit kerja eselon 4 | Keluhan pemangku kepentingan secara langsung lisan atau tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 kali dalam satu tahun anggaran | Proses Bisnis tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari | Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d. < 100% |
| 3 | Sedang | Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 50 juta s.d Rp 100 juta | Pelanggaran ringan dengan surat peringatan | Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada lingkup unit kerja eselon 3 | Pemberitaan negatif di dalam media massa lokal | Proses Bisnis tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari | Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d. < 80% |
| 4 | Besar | Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 100 juta s.d Rp 500 juta | Pelanggaran sedang yang dikenakan sanksi administratif | Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada lingkup unit kerja eselon 2 | Pemberitaan negatif di dalam media massa nasional | Proses Bisnis tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari | Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d. < 50% |
| 5 | Besar Sekali | Jumlah kerugian negara lebih Rp 500 juta | Pelanggaran berat dengan sanksi hukum | Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada BSSN | Pemberitaan negatif di dalam media massa internasional | Proses Bisnis tertunda di atas 30 hari | Pencapaian target kinerja ≤ 25% |

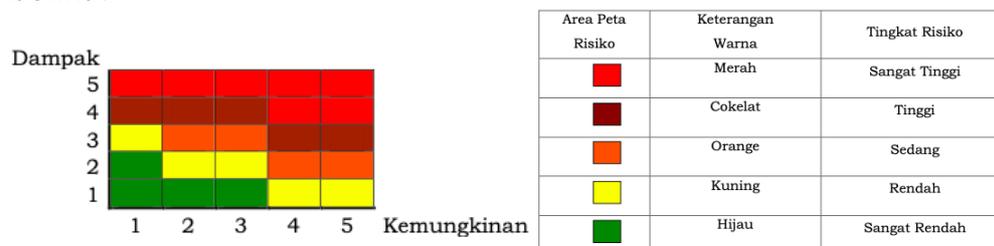
b. Skala Kemungkinan

Skala kemungkinan yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi

| Nilai | Tingkat | Frekuensi Kemungkinan Terjadinya |
|-------|----------------------------|---|
| 1 | Hampir pasti tidak terjadi | Risiko ini belum pernah terjadi, walaupun terjadi hanya 1 (satu) kali per tahun |
| 2 | Jarang | Kejadian terjadi 2 (dua) kali per tahun |
| 3 | Sedang | Kejadian lebih dari 2 (dua) kali per tahun, namun tidak lebih dari 5 (lima) kali per tahun |
| 4 | Sering | Kejadian lebih dari 5 (lima) kali per tahun, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali per tahun |
| 5 | Hampir pasti terjadi | Kejadian lebih dari 10 (sepuluh) kali per tahun |

c. Tingkat Risiko

Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampak Risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan tingkat Risiko. Tingkat Risiko menggunakan 5 (lima) skala tingkatan yang direpresentasikan dengan warna pada area Peta Risiko sebagai berikut:



Gambaran respon terhadap Risiko sesuai area warna sebagai berikut:

| Area Peta Risiko | Keterangan |
|---|--|
|  | berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon. |
|  | berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan cokelat berjalan. |
|  | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |
|  | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). |

3. Selera Risiko

Selera Risiko dalam Peta Risiko direpresentasikan dengan warna “hijau” yang bermakna memiliki tingkat risiko “sangat rendah”. Selera Risiko BSSN ditetapkan oleh Kepala BSSN dan Selera Risiko unit kerja ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja dan selaras dengan Selera Risiko BSSN.

4. Jenis Respon terhadap Risiko

Pemilik Risiko menetapkan respon atas setiap Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani. Pilihan respon Risiko dalam Penilaian Risiko yaitu:

- Menerima Risiko, yaitu pemilik Risiko menerima Risiko dan tidak melakukan intervensi apapun terhadap Risiko;
- Mitigasi (mengurangi Risiko), yaitu pemilik Risiko melakukan intervensi Risiko dengan membangun aktivitas pengendalian yang dapat mengurangi tingkat Risikonya;
- Membagi Risiko, yaitu pemilik Risiko mendistribusikan Risiko kepada pihak lain; atau
- Menolak Risiko, yaitu pemilik Risiko menetapkan menolak Risiko dengan tidak melakukan kegiatan terkait.

| TINGKAT RISIKO | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kemungkinan |
| 5 | Red | Red | Red | Red | Red | |
| 4 | Dark Red | |
| 3 | Yellow | Orange | Orange | Dark Red | Dark Red | |
| 2 | Green | Yellow | Yellow | Orange | Orange | |
| 1 | Green | Green | Green | Yellow | Yellow | |

5. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian Risiko terdiri dari tahapan penetapan konteks dan

analisis tujuan, identifikasi dan analisis Risiko serta evaluasi Risiko dan pengendalian terpasang. Langkah kerja penetapan risiko yaitu:

- a. Penetapan Konteks dan Analisis Tujuan
- b. Identifikasi Risiko
- c. Analisis Risiko
- d. Evaluasi Risiko dan
- e. Pengendalian Terpasang.

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

B. RISIKO STRATEGIS

1. Identifikasi Risiko

| RISIKO STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA BSSN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|--|-----------|------|--|--------------------|
| PEMILIK RISIKO : | | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | | |
| KEGIATAN : | | Identifikasi Risiko Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan risiko berdampak pada tujuan organisasi dan tujuan pengadaan | | | | | | | |
| TUJUAN KEGIATAN : | | K1.T1 Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu K2.T2 Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan K3.T3 Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa | | | | | | | |
| No | Tujuan Strategis | Kode Risiko | Risiko | | Penyebab | | D/TD | Dampak | Klasifikasi Risiko |
| | | | Pernyataan | Pemilik | Pernyataan | Sumber | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu | K1.T1.1 | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | BPBJ | 1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan | eksternal | TD | Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu | Strategis |
| | Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan | K2.T2.1 | Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan | BPBJ | Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa | eksternal | D | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Strategis |
| | Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa | K3.T3.1 | Rendahnya tingkat kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa | BPBJ | 1. Kurangnya fasilitas layanan pengadaan barang/jasa 2. Kurangnya kompetensi personil terkait standar layanan pengadaan barang/jasa | internal | D | Tingginya aduan layanan pengadaan barang/jasa dari stakeholder internal dan eksternal | Strategis |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

| No | Tujuan Strategis | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) |
|----|---|-------------|---|--------------------|---------|--|--|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu | K1.T1.1 | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Strategis | BPBJ | 1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan | Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu | 5 | 2 | 10 | Sedang |
| | Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan | K2.T2.1 | Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan | Strategis | BPBJ | Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | 2 | 5 | 10 | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa | K3.T3.1 | Rendahnya tingkat kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa | Strategis | BPBJ | 1. Kurangnya fasilitas layanan pengadaan barang/jasa 2. Kurangnya kompetensi personil terkait standar layanan pengadaan barang/jasa | Tingginya aduan layanan pengadaan barang/jasa dari stakeholder internal dan eksternal | 2 | 2 | 4 | Rendah |

3. Daftar Prioritas

| No | Tujuan Strategis | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko |
|----|---|-------------|---|--------------------|---------|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu | K2.T2.1 | Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan | Strategis | BPBJ | Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan | K1.T1.1 | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Strategis | BPBJ | 1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan | Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu | Sedang |
| | Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa | K3.T3.1 | Rendahnya tingkat kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa | Strategis | BPBJ | 1. Kurangnya fasilitas layanan pengadaan barang/jasa 2. Kurangnya kompetensi personil terkait standar layanan pengadaan barang/jasa | Tingginya aduan layanan pengadaan barang/jasa dari stakeholder internal dan eksternal | Rendah |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

4. Evaluasi Risiko

| No | Tujuan Strategis | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang | | Pengendalian Dibutuhkan |
|----|--|-------------|---|--------------------|---------|--|--|----------------|---|---------|---|
| | | | | | | | | | Uraian | E/KE/TE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu | K2.T2.1 | Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan | Strategis | BPBJ | Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Sangat Tinggi | Pengoptimalisasi Rapat Penjelasan, agar penyedia mempunyai gambaran untuk paket tersebut | E | - Optimalisasi Rapat penjelasan dengan penyedia - Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) |
| | Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan | K1.T1.1 | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Strategis | BPBJ | 1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan | Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu | Sedang | Dibuatkan workshop atau seminar untuk penyedia terkait peraturan-peraturan pengadaan barang/jasa secara umum dan tata cara tender/seleksi secara umum | E | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) |

5. RTP

| No | Tujuan Strategis | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Tingkat Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Waktu Pelaksanaan |
|----|--|-------------|---|--------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu | K2.T2.1 | Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan | Strategis | Sangat Tinggi | - Optimalisasi Rapat penjelasan dengan penyedia - Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia) | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Februari 2021 |
| | Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan | K1.T1.1 | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Strategis | Sedang | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Maret 2021 |

6. Pemantauan RTP

| No | Tujuan Strategis | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Status | | | Keterangan | Residual Risk | | | | Penjelasan |
|----|--|-------------|---|---|------------------------------|--------|----|---|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | S | SB | B | | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu | K2.T2.1 | Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan | - Optimalisasi Rapat penjelasan dengan penyedia - Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 2 | 2 | 4 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |
| | Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan | K1.T1.1 | Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 5 | 2 | 10 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

7. Profil Risiko

| TINGKAT RISIKO | | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|-----------|---|-------------|
| Dampak | | | | | | |
| 5 | • K2.T2.1 | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 2 | • K3.T3.1 | | | • K1.T1.1 | | |
| 1 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kemungkinan |

| Area Peta | Tingkat Risiko |
|-----------|----------------|
| | Sangat Rendah |
| | Rendah |
| | Sedang |
| | Tinggi |
| | Sangat Tinggi |

| No | Area Peta Risiko | Keterangan |
|----|------------------|---|
| 1 | | berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon. |
| 2 | | berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan. |
| 3 | | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |
| 4 | | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

C. RISIKO OPERASIONAL

1. Identifikasi Risiko

| HASIL IDENTIFIKASI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|----------|------|---|--------------------|
| PEMILIK RISIKO : | | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | | |
| KEGIATAN : | | Identifikasi Risiko Operasional Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan risiko berdampak pada tujuan organisasi berdasarkan tupoksi UKPBJ dalam menjalankan fungsi pengadaan di organisasi BSSN | | | | | | | |
| TUJUAN KEGIATAN : | | K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | | | | | | | |
| No | Jenis Risiko | Kode Risiko | Risiko | | Penyebab | | D/TD | Dampak | Klasifikasi Risiko |
| | | | Pernyataan | Pemilik | Pernyataan | Sumber | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa | K1.T1.1 | timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa | BPBJ | belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa | internal | D | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | operasional |
| | K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | K1.T1.2 | Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE | BPBJ | Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE | internal | TD | Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE | operasional |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) |
|----|--|-------------|--|--------------------|---------|--|---|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | K1.T1.1 Resiko Operasional - Melaksanakan pengadaan barang/jasa | K1.T1.1 | timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa | operasional | BPBJ | belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | 2 | 5 | 10 | Sangat Tinggi |
| | K1.T1.2 Resiko Operasional - pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | K1.T1.2 | Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE | operasional | BPBJ | Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE | Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE | 2 | 4 | 8 | Tinggi |

3. Daftar Prioritas

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko |
|----|---|-------------|--|--------------------|---------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa | K1.T1.1 | timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa | operasional | BPBJ | belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | Sangat Tinggi |
| | K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | K1.T1.2 | Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE | operasional | BPBJ | Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE | Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE | Tinggi |

4. Evaluasi Risiko

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang | | Pengendalian Dibutuhkan |
|----|---|-------------|--|--------------------|---------|--|---|----------------|--|---------|---|
| | | | | | | | | | Uraian | E/KE/TE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa | K1.T1.1 | timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa | operasional | BPBJ | belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | Sangat Tinggi | 1. Sharing pengetahuan dan diskusi antara Pokja Pemilihan terkait proses pengadaan barang/jasa 2. Mengikutsertakan Pokja Pemilihan pada kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap proses pemilihan pengadaan barang/jasa seperti pelatihan, konferensi ataupun bimbingan teknis | E | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait proses pemilihan. 2. Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) |
| | K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | K1.T1.2 | Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE | operasional | BPBJ | Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE | Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE | Tinggi | 1. Adanya pengelola LPSE yang terdiri dari helpdesk, administrator, verifikator 2. Melaksanakan LPSE sesuai dengan standar 17 LPSE | KE | 1. Penambahan personil pengelola LPSE |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

5. RTP

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Tingkat Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|-------------|--|--------------------|----------------|---|---|-------------------|
| 1 | K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa | K1.T1.1 | timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa | operasional | Sangat Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait proses pemilihan. 2. Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Februari 2021 |
| 2 | K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | K1.T1.2 | Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE | operasional | Tinggi | 1. Penambahan personil pengelola LPSE | - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola LPSE pada sisi manajerial - Pusdatik untuk mengelola LPSE pada sisi teknis sistem | 2022 |

6. Pemantauan RTP

| No | Tujuan Strategis | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Status | | | Keterangan | Residual Risk | | | | Penjelasan |
|----|---|-------------|--|---|---|--------|----|---|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | S | SB | B | | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) | |
| 1 | K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa | K1.T1.1 | timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait proses pemilihan. 2. Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 2 | 2 | 4 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| 2 | K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik | K1.T1.2 | Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE | 1. Penambahan personil pengelola LPSE | - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola LPSE pada sisi manajerial - Pusdatik untuk mengelola LPSE pada sisi teknis sistem | | | B | Risiko Belum Dikendalikan | 2 | 4 | 8 | Tinggi | berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direpon. |

7. Profil Risiko

| TINGKAT RISIKO | | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|---|---|-------------|
| Dampak | | | | | | |
| 5 | • K1.T1.1 | | | | | |
| 4 | • K1.T1.2 | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kemungkinan |

| Area Peta | Tingkat Risiko |
|-----------|----------------|
| | Sangat Rendah |
| | Rendah |
| | Sedang |
| | Tinggi |
| | Sangat Tinggi |

| No | Area Peta Risiko | Keterangan |
|----|------------------|---|
| 1 | | berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon. |
| 2 | | berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan. |
| 3 | | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |
| 4 | | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). |

D. RISIKO PROSES
PAKET PENGADAAN PERANGKAT PENDUKUNG SISTEM INFORMASI LAYANAN PBJ
 1. Identifikasi Risiko

| RISIKO PROSES PER PAKET PENGADAAN BARANG/JASA | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|------|--|--------------------|
| PEMILIK RISIKO : | | Kelompok Kerja Pemilihan 2 | | | | | | | |
| KEGIATAN : | | 1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa | | | | | | | |
| TUJUAN KEGIATAN : | | K1.T1. Memperoleh Dokumen yang telah sesuai dan metode pemilihan yang tepat | | | | | | | |
| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Risiko | | Penyebab | | D/TD | Dampak | Klasifikasi Risiko |
| | | | Pernyataan | Pemilik | Pernyataan | Sumber | | | |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Internal | D | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | Kepatuhan |
| | | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Internal | D | Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Internal | D | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Internal | D | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitnya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | Internal | D | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan |
| | | K2.T2.2 | Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | Pokja Pemilihan | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | Internal | D | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan |
| | | K2.T2.3 | Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | Internal dan Eksternal | D | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan |
| | | K2.T2.4 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | Internal dan Eksternal | TD | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kecurangan |
| | | K2.T2.5 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | Eksternal | TD | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kecurangan |
| | | K2.T2.6 | Seluruh penawaran harga diatas HPS | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Internal | D | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) |
|----|--|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | K1.T1.1 | Revisi (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | 5 | 2 | 10 | Sedang |
| | | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 1 | 5 | 5 | Sangat Tinggi |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 3 | 4 | 12 | Tinggi |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 5 | 4 | 20 | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 2 | 4 | 8 | Tinggi |
| | | K2.T2.2 | Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 4 | 1 | 4 | Rendah |
| | | K2.T2.3 | Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 4 | 1 | 4 | Rendah |
| | | K2.T2.4 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN) | Kecurangan | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender | 1 | 5 | 5 | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.5 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta menduduki HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 1 | 5 | 5 | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.6 | Seluruh penawaran harga diatas HPS | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 3 | 1 | 3 | Sangat Rendah |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

3. Daftar Prioritas

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko |
|----|--|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|
| 1 | Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Sangat Tinggi |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.4 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Kecurangan | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.5 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Tinggi |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Tinggi |
| | | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | Sedang |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

5. Evaluasi Risiko

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang | | Pengendalian Dibutuhkan |
|----|--|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | | Uraian | E/KE/TE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Sangat Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Sangat Tinggi | 1. Berdasarkan template Dokumen Pemilihan yang diterbitkan oleh LKPP 2. Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan |
| | | K2.T2.4 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Kecurangan | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi | Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | KE | Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) |
| | | K2.T2.5 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi | Belum ada | TE | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses evaluasi | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi |
| | | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | Sedang | Sharing pengetahuan dan diskusi antara Pokja Pemilihan dengan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan | KE | Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

6. RTP

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Tingkat Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Waktu Pelaksanaan |
|----|--|-------------|--|--------------------|----------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Sangat Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Sangat Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan setelah Dokumen Pemilihan disusun |
| | | K2.T2.4 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Kecurangan | Sangat Tinggi | Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Inspektorat | Pengawasan dilakukan pada saat proses pemilihan berjalan |
| | | K2.T2.5 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Sangat Tinggi | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat | Bagian Layanan Pengadaan | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha pada tahun 2020 |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kepatuhan | Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum hasil evaluasi ditetapkan dan diumumkan |
| | | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Sedang | Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

7. Informasi dan Komunikasi

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Pernyataan Risiko | Rencana Tindak | Informasi yang dibutuhkan | Sumber | Penanggung jawab |
|----|---|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | 1. Internet, penawaran pihak peyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review |
| | | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | 1. Internet, penawaran pihak peyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review |
| | | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Koordinasi jadwal pengadaan dan pengawasan | Auditor Inspektorat | Inspektorat |
| | | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat | Materi pembinaan yang dibutuhkan Pelaku Usaha | Kuesioner kepada Pelaku Usaha | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | 1. Internet, penawaran pihak peyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review |
| | | Kesalahan dalam proses evaluasi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait proses evaluasi | 1. Internet, penawaran pihak peyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review |
| | | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan | Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan | Internet, penawaran pihak peyelenggara diklat dsb | Bagian Layanan Pengadaan |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

8. Pemantauan RTP

| REALISASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|---|--------|----|---|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|
| SEMESTER 2 / TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Status | | | Keterangan | Residual Risk | | | | Penjelasan |
| | | | | | | S | SB | B | | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 3 | 3 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 4 | 1 | 4 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| | | K2.T2.4 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Inspektorat | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 3 | 3 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| | | K2.T2.5 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 3 | 3 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 3 | 2 | 6 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 2 | 2 | 4 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| | | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 5 | 1 | 5 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |

9. Profil Risiko

| Profil Risiko Paket Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-------------|
| Dampak | | | | | | |
| 5 | ● K1.T1.2 ● K2.T2.4 | | | | | |
| 4 | | ● K2.T2.1 | ● K1.T1.3 | | ● K1.T1.4 | |
| 3 | ▶ K1.T1.2 ▶ K2.T2.4 | | | | | |
| 2 | | ▶ K2.T2.1 | ▶ K1.T1.3 | | ● K1.T1.1 | |
| 1 | | | ● K2.T2.6 | ● K2.T2.2 ● K2.T2.3 | ▶ K1.T1.4 ▶ K1.T1.1 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kemungkinan |

| Area Peta | Tingkat Risiko |
|-----------|----------------|
| | Sangat Rendah |
| | Rendah |
| | Sedang |
| | Tinggi |
| | Sangat Tinggi |

| No | Area Peta Risiko | Keterangan |
|----|------------------|---|
| 1 | | berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon. |
| 2 | | berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan. |
| 3 | | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |
| 4 | | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

PAKET PENGADAAN PERANGKAT PENDUKUNG SISTEM INFORMASI LAYANAN PBJ

1. Identifikasi Risiko

| HASIL IDENTIFIKASI RISIKO PER PAKET PENGADAAN BARANG/JASA | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------------|----|--|-------------|--------------------|
| PEMILIK RISIKO | | Kelompok Kerja Pemilihan | | | | | | | | |
| KEGIATAN | | 1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa | | | | | | | | |
| TUJUAN KEGIATAN | | K1.T1. Memperoleh Dokumen yang telah sesuai dan metode pemilihan yang tepat | | | | | | | | |
| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Risiko | | Penyebab | | | D/TD | Dampak | Klasifikasi Risiko |
| | | | Pernyataan | Pemilik | Pernyataan | Sumber | | | | |
| 1 | Pembangunan Power House | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi | Internal | D | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | Kepatuhan | |
| | | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Internal | D | 1. Salah pilih penyedia 2. Gagai tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa | Kepatuhan | |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Internal | D | 1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagai tender 3. Pelanggaran administratif | Kepatuhan | |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | PPK dan Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Internal | D | 1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagai tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan | Kepatuhan | |
| | | K1.T1.5 | Ketidaksihinggaan jenis kontrak dan ketidakcemeraman dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir | PPK dan Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko | Internal | D | 1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Potensi kerugian negara | Operasional | |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | Internal | D | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan | |
| | | K2.T2.2 | Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | Pokja Pemilihan | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | Internal | D | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan | |
| | | K2.T2.3 | Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi | Pokja Pemilihan | Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi | Internal dan Eksternal | D | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagai tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/ pengaduan | Operasional | |
| | | K2.T2.4 | Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | Internal dan Eksternal | D | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan | |
| | | K2.T2.5 | Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi | Pokja Pemilihan | 1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam | Internal | D | 1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagai Tender | Operasional | |
| | | K2.T2.6 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | Internal dan Eksternal | TD | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kecurangan | |
| | | K2.T2.7 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | Eksternal | TD | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kecurangan | |
| | | K2.T2.8 | Seluruh penawaran harga diatas HPS | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence | Internal | D | 1. Gagai tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Kepatuhan | |
| | | K2.T2.9 | Salah memilih penyedia | Pokja Pemilihan | Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Internal | D | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagai tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Operasional | |
| | | K2.T2.10 | Pengaduan | PPK dan Pokja Pemilihan | Persyaratan kualifikasi yang berlebihan | Internal | D | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagai tender 3. Tender ulang 4. Hukuman disiplin/administratif/ pidana/perdata | Operasional | |
| | | K2.T2.11 | Sanggah | Pokja Pemilihan | 1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional | Eksternal | D | 1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagai Tender | Operasional | |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) |
|----|----------------------------------|-------------|---|--------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pembangunan Power House | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | 5 | 2 | 10 | Sedang |
| | | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Salah pilih penyedia 2. Gagal tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa | 1 | 5 | 5 | Sangat Tinggi |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagal tender 3. Pelanggaran administratif | 3 | 4 | 12 | Tinggi |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | PPK dan Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagal tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan | 5 | 4 | 20 | Sangat Tinggi |
| | | K1.T1.5 | Ketidaksihonestan jenis kontrak dan ketidakcermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir | Operasional | PPK dan Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko | 1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Potensi kerugian negara | 2 | 4 | 8 | Tinggi |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 2 | 4 | 8 | Tinggi |
| | | K2.T2.2 | Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 4 | 1 | 4 | Rendah |
| | | K2.T2.3 | Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi | Operasional | Pokja Pemilihan | Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/pengaduan | 2 | 4 | 8 | Tinggi |
| | | K2.T2.4 | Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit | 1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 4 | 1 | 4 | Rendah |
| | | K2.T2.5 | Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi | Operasional | Pokja Pemilihan | 1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam | 1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagal Tender | 1 | 4 | 4 | Tinggi |
| | | K2.T2.6 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Kecurangan | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 1 | 5 | 5 | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.7 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 1 | 5 | 5 | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.8 | Seluruh penawaran harga diatas HPS | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence | 1. Gagal tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 3 | 3 | 9 | Sedang |
| | | K2.T2.9 | Salah memilih penyedia | Operasional | Pokja Pemilihan | Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | 4 | 3 | 12 | Tinggi |
| | | K2.T2.10 | Pengaduan | Operasional | PPK dan Pokja Pemilihan | Persyaratan kualifikasi yang berlebihan | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Hukuman disiplin/administratif/pidana/perdata | 1 | 4 | 4 | Tinggi |
| | | K2.T2.11 | Sanggah | Operasional | Pokja Pemilihan | 1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional | 1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagal Tender | 3 | 4 | 12 | Tinggi |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

3. Daftar Prioritas

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko |
|----|----------------------------------|-------------|---|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------|
| 1 | Pembangunan Power House | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Salah pilih penyedia 2. Gagal tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa | Sangat Tinggi |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | PPK dan Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagal tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.6 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Kecurangan | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan dilambatkan sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi |
| | | K2.T2.7 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagal tender 3. Pelanggaran administratif | Tinggi |
| | | K1.T1.5 | Ketidaksesuaian jenis kontrak dan ketidaktepatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir | Operasional | PPK dan Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko | 1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Potensi kerugian negara | Tinggi |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitnya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Tinggi |
| | | K2.T2.3 | Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi | Operasional | Pokja Pemilihan | Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/ pengaduan | Tinggi |
| | | K2.T2.5 | Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi | Operasional | Pokja Pemilihan | 1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam | 1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagal Tender | Tinggi |
| | | K2.T2.9 | Salah memilih penyedia | Operasional | Pokja Pemilihan | Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Tinggi |
| | | K2.T2.10 | Pengaduan | Operasional | PPK dan Pokja Pemilihan | Persyaratan kualifikasi yang berlebihan | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Hukuman disiplin/administratif/ pidana/perdata | Tinggi |
| | | K2.T2.11 | Sanggah | Operasional | Pokja Pemilihan | 1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional | 1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagal Tender | Tinggi |
| | | K1.T1.1 | Revisi (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | Sedang |
| | | K2.T2.8 | Seluruh penawaran harga diatas HPS | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence | 1. Gagal tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sedang |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

5. Evaluasi Risiko

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Pemilik | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang | | Pengendalian Dibutuhkan |
|----|----------------------------------|-------------|---|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | | Uraian | E/KE/TE | |
| 1 | Pembangunan Power House | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Salah pilih penyedia 2. Gagal tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa | Sangat Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | PPK dan Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagal tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan | Sangat Tinggi | 1. Berdasarkan template Dokumen Pemilihan yang diterbitkan oleh LKPP 2. Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan |
| | | K2.T2.6 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Kecurangan | Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktik KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender | 1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi | Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender | KE | Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) |
| | | K2.T2.7 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Peserta Tender | 1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta | 1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sangat Tinggi | Belum ada | TE | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagal tender 3. Pelanggaran administratif | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan |
| | | K1.T1.5 | Ketidaksesuaian jenis kontrak dan ketidakcermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir | Operasional | PPK dan Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko | 1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Polensi kerugian negara | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait manajemen kontrak | KE | 1. Peningkatan kompetensi manajemen kontrak 2. Menggunakan jasa ahli kontrak 3. Meminta pendapat hukum pada ahli yang kompeten |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Pokja Pemilihan | 1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitnya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran | 1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses evaluasi | KE | 1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi |
| | | K2.T2.3 | Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi | Operasional | Pokja Pemilihan | Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/pengaduan | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses kualifikasi | KE | 1. Ketentuan kualifikasi dalam Dokpil harus jelas dan rinci 2. Ketentuan kualifikasi dibacakan dan diklarifikasi pada saat penjelasan pekerjaan 3. Pembinaan personal Pokja Pemilihan |
| | | K2.T2.5 | Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi | Operasional | Pokja Pemilihan | 1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam | 1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagal Tender | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait daftar hitam | KE | 1. Integrasi SIKAP dengan Daftar Hitam 2. Akun Penyedia yang masuk Daftar Hitam diblokir/dibekukan dalam kurun waktu tertentu |
| | | K2.T2.9 | Salah memilih penyedia | Operasional | Pokja Pemilihan | Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses kualifikasi | KE | 1. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Melibatkan Agen Pengadaan dalam proses barang/jasa yang strategis dan kompleks |
| | | K2.T2.10 | Pengaduan | Operasional | PPK dan Pokja Pemilihan | Persyaratan kualifikasi yang bertentangan | 1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. hukuman disiplin/administratif/ pidana/perdata | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah | KE | Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah |
| | | K2.T2.11 | Sanggah | Operasional | Pokja Pemilihan | 1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional | 1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagor Tender | Tinggi | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait bagaimana cara menghadapi dan menjawab sanggah berdasarkan peraturan yang berlaku | KE | Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah |
| | | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan PPK | 1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi | Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama | Sedang | Sharing pengetahuan dan diskusi antara Pokja Pemilihan dengan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan | KE | Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan |
| | | K2.T2.8 | Seluruh penawaran harga diatas HPS | Kepatuhan | Pokja Pemilihan dan Peserta Tender | 1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence | 1. Gagor tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama | Sedang | Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait metode penyusunan HPS | KE | 1. Bimbingan teknis penyusunan HPS 2. Memperbanyak referensi dan literatur market intelligence dan metode-metode analisis pasar |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

6. RTP

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Klasifikasi Risiko | Tingkat Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Waktu Pelaksanaan |
|----|----------------------------------|-------------|---|--------------------|----------------|--|---|--|
| 1 | Pembangunan Power House | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Sangat Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran |
| | | K1.T1.4 | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Sangat Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan setelah Dokumen Pemilihan disusun |
| | | K2.T2.6 | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Kecurangan | Sangat Tinggi | Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Inspektorat | Pengawasan dilakukan pada saat proses pemilihan berjalan |
| | | K2.T2.7 | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Kecurangan | Sangat Tinggi | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat | Bagian Layanan Pengadaan | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha pada tahun 2021 |
| | | K1.T1.3 | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | Kepatuhan | Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan |
| | | K1.T1.5 | Ketidaksihonestan jenis kontrak dan ketidakcermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir | Operasional | Tinggi | 1. Peningkatan kompetensi manajemen kontrak 2. Menggunakan jasa ahli kontrak 3. Meminta pendapat hukum pada ahli yang kompeten | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |
| | | K2.T2.1 | Kesalahan dalam proses evaluasi | Kepatuhan | Tinggi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | 1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum hasil evaluasi ditetapkan dan diumumkan |
| | | K2.T2.3 | Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi | Operasional | Tinggi | 1. Ketentuan kualifikasi dalam Dokpil harus jelas dan rinci 2. Ketentuan kualifikasi dibacakan dan diklarifikasi pada saat penjelasan pekerjaan 3. Pembinaan personil Pokja Pemilihan | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |
| | | K2.T2.5 | Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi | Operasional | Tinggi | 1. Integrasi SiKAP dengan Daftar Hitam 2. Akun Penyedia yang masuk Daftar Hitam diblokir/dibekukan dalam kurun waktu tertentu | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |
| | | K2.T2.9 | Salah memilih penyedia | Operasional | Tinggi | 1. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Melibatkan Agen Pengadaan dalam proses barang/jasa yang strategis dan kompleks | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |
| | | K2.T2.10 | Pengaduan | Operasional | Tinggi | Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |
| | | K2.T2.11 | Sanggah | Operasional | Tinggi | Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |
| | | K1.T1.1 | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Kepatuhan | Sedang | Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |
| | | K2.T2.8 | Seluruh penawaran harga diatas HPS | Kepatuhan | Sedang | 1. Bimbingan teknis penyusunan HPS 2. Memperbanyak referensi dan literatur market intelligence dan metode-metode analisis pasar | Bagian Layanan Pengadaan | Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

7. Pemantauan RTP

| No | Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Rencana Tindak | Penanggung Jawab | Status | | | Keterangan | Residual Risk | | | Penjelasan | |
|----------|----------------------------------|---|--|--|---|--------|----|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---|---|
| | | | | | | S | SB | B | | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Skala Status Risiko | | Tingkat Risiko (Sesuai Warna) |
| 1 | Pembangunan Power House | K1.T1.2 | Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 3 | 3 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. |
| K1.T1.4 | | Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 5 | 1 | 5 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. | |
| K2.T2.6 | | Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Inspektorat | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 3 | 3 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. | |
| K2.T2.7 | | Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat | Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 2 | 2 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. | |
| K1.T1.3 | | Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 2 | 2 | 4 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. | |
| K1.T1.5 | | Kelidaksesuaian jenis kontrak dan kelidakecermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir | 1. Peningkatan kompetensi manajemen kontrak 2. Menggunakan jasa ahli kontrak 3. Meminta pendapat hukum pada ahli yang kompeten | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 2 | 2 | Sangat Rendah | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). | |
| K2.T2.1 | | Kesalahan dalam proses evaluasi | 1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi | - Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 2 | 1 | 2 | Sangat Rendah | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). | |
| K2.T2.3 | | Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi | 1. Ketentuan kualifikasi dalam Dokpil harus jelas dan rinci 2. Ketentuan kualifikasi dibacakan dan diklarifikasi pada saat penjabaran pekerjaan 3. Pembinaan personil Pokja Pemilihan | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 2 | 1 | 2 | Sangat Rendah | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). | |
| K2.T2.5 | | Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi | 1. Integrasi SIKAP dengan Daftar Hitam 2. Akun Penyedia yang masuk Daftar Hitam diblokir/dibekukan dalam kurun waktu tertentu | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 2 | 2 | Sangat Rendah | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). | |
| K2.T2.9 | | Salah memilih penyedia | 1. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Melibatkan Agen Pengadaan dalam proses barang/jasa yang strategis dan kompleks | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 4 | 1 | 4 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. | |
| K2.T2.10 | | Pengaduan | Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 1 | 2 | 2 | Sangat Rendah | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). | |
| K2.T2.11 | | Sanggah | Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 3 | 1 | 3 | Sangat Rendah | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). | |
| K1.T1.1 | | Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama | Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 5 | 1 | 5 | Rendah | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa. | |
| K2.T2.8 | | Seluruh penawaran harga diatas HPS | 1. Bimbingan teknis penyusunan HPS 2. Memperbanyak referensi dan literatur market intelligence dan metode-metode analisis pasar | Bagian Layanan Pengadaan | S | | | Risiko Telah Dikendalikan | 3 | 1 | 3 | Sangat Rendah | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). | |

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

8. Profil Risiko

| TINGKAT RISIKO | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--|---|-------------|
| Dampak | | | | | | |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • K1.T1.2 • K2.T2.6 • K2.T2.7 | | | | | |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • K2.T2.5 • K2.T2.10 | <ul style="list-style-type: none"> • K1.T1.5 • K2.T2.1 • K2.T2.3 | <ul style="list-style-type: none"> • K1.T1.3 • K2.T2.11 | | <ul style="list-style-type: none"> • K1.T1.4 | |
| 3 | | | <ul style="list-style-type: none"> • K2.T2.8 | <ul style="list-style-type: none"> • K2.T2.9 | | |
| 2 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • K1.T1.1 | |
| 1 | | | | <ul style="list-style-type: none"> • K2.T2.2 • K2.T2.4 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kemungkinan |

| Area Peta | Tingkat Risiko |
|-----------|----------------|
| | Sangat Rendah |
| | Rendah |
| | Sedang |
| | Tinggi |
| | Sangat Tinggi |

| No | Area Peta Risiko | Keterangan |
|----|------------------|---|
| 1 | | berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon. |
| 2 | | berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan. |
| 3 | | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |
| 4 | | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). |

E. KONSOLIDASI PROFIL RISIKO

Di bawah ini merupakan hasil konsolidasi profil risiko dari 4 (empat) profil risiko diatas. Konsolidasi ini dilakukan berdasarkan satu risiko di setiap profil dengan nilai Probabilitas dan Dampak terbesar.

| PROFIL RISIKO PAKET KONSOLIDASI | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|-------------|
| Dampak | | | | | | |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Risiko Proses Paket 1 • Risiko Proses Paket 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Risiko Strategis • Risiko Operasional | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kemungkinan |

| Area Peta | Tingkat Risiko |
|-----------|----------------|
| | Sangat Rendah |
| | Rendah |
| | Sedang |
| | Tinggi |
| | Sangat Tinggi |

| No | Area Peta Risiko | Keterangan |
|----|------------------|---|
| 1 | | berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon. |
| 2 | | berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan. |
| 3 | | berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. |
| 4 | | berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima). |

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dihadapkan dengan Risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko, Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan penilaian Risiko atas strategis, operasional dan proses yang dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian Risiko meliputi tahapan identifikasi, analisis, evaluasi Risiko dan pengendalian terpasang serta menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko serta menggambarannya dalam bentuk profil risiko.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah menetapkan **Risiko** prioritas yang akan ditangani berdasarkan garis tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance*). Risiko dan pelaksanaan RTP yang telah disusun tersebut akan dilakukan pemantauan secara berkelanjutan baik oleh Pemilik Risiko maupun Inspektorat sebagai unsur pengawasan di BSSN. Dengan komitmen yang tinggi dan pengelolaan Risiko secara efektif, akan membantu Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mencapai tujuan, meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi.

| | |
|--|--|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tosany Sofyan Harnowo, S.Pd. NIP. 19771208 199812 1 001 |
|--|--|

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara